

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu ekonomi merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang didalamnya mempelajari tingkah laku individu maupun organisasi dalam kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi (Raufaidah, 2015). Saat ini ilmu ekonomi telah mengalami berbagai tahapan evolusi yang menarik, salah satunya ditandai dengan mulainya ilmu ekonomi berpadu dengan disiplin ilmu lainnya. Dalam hal perpaduan, disiplin ilmu yang memiliki hubungan paling dekat dengan ilmu ekonomi ialah ilmu psikologi. Dimana ilmu psikologi dapat memperluas pandangan para ekonom mengenai perilaku manusia dalam kegiatan konsumsi, produksi, maupun distribusi (Putra dan Sudibia, 2013). Dengan lebih luasnya pandangan para ekonom, indikator kesejahteraan masyarakat yang selama ini digunakan dapat dikembangkan dengan menambahkan faktor-faktor non ekonomi. Kebahagiaan ekonomi (*Economics of Happiness*) ialah sebuah pendekatan yang dilakukan untuk mengukur kesejahteraan dengan cara menggabungkan teknik yang digunakan oleh seorang psikolog dan teknik yang digunakan oleh seorang ekonom (Graham, 2009). Ilmu ekonomi selama ini hanya menggunakan patokan Produk Domestik Bruto sebagai ukuran pencapaian kesejahteraan masyarakat suatu negara.

Sejak tahun 1944 dalam Konferensi Bretton Woods, Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Products* (GDP) memiliki

peran sebagai pengukur kemajuan atau pertumbuhan ekonomi suatu negara dan sekitar tahun 1960an GDP ini mulai digunakan sebagai suatu indikator kesejahteraan suatu negara secara umum (Rahayu, 2016). Namun, GDP memiliki kelemahan dimana indikator tersebut mengabaikan adanya variasi kekayaan, jasa produksi rumah tangga, kerusakan lingkungan alam, kualitas relasi sosial, keamanan ekonomi dan keselamatan personal dan harapan hidup (Fleurbaey, 2009). “*Gross Domestic Products* (GDP) memiliki kelemahan diantaranya tidak diperhitungkannya biaya sosial, peningkatan pendapatan absolut sangat diperhatikan, mengabaikan distribusi pendapatan, tidak mengukur aktivitas di luar pasar atau transaksi informal, dan mengabaikan dampak aktivitas ekonomi terhadap lingkungan hidup”, (Bergh, 2009).

Dengan adanya berbagai kelemahan dari *Gross Domestic Products* (GDP) atau sering disebut “*Beyond Gross Domestic Products*” sebagai pengukur tingkat kesejahteraan, maka mendorong para ilmuwan untuk memunculkan alternatif pengukur lain yang lebih baik dari GDP yaitu *Measure of Economic Welfare* (MEW) pada tahun 1970 oleh Tobin dan Nordhaus, *Physical Quality of Life Index* (PQLI) pada tahun yang sama dengan MEW yaitu tahun 1970 oleh Morris, *Index of Sustainable Economic Welfare* (ISEW) pada tahun 1989 oleh Cobb dan Daly, *Human Development Index* (HDI) sekitar tahun 1990an, *The Genuine Progress Indicator* (GPI), dan *The Index of Economic Well-Being* (IEWB) pada tahun 1998 oleh Sharpe dan Osberg. Sejak diperkenalkannya *Human*

Development Index (HDI) pada tahun 1990an, HDI mulai digunakan di berbagai negara namun HDI juga masih memiliki beberapa kelemahan sehingga muncul alternatif lain ditahun 2010 yaitu *Inequality-adjusted Human Development Index* (IHDI). Selanjutnya pada tahun 2011, dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mulai digunakannya indeks kebahagiaan (*happiness index*) sebagai pengukur kesejahteraan suatu negara. Disisi lain, sejak tahun 1972 Bhutan telah menggunakan *Gross National Happiness* sebagai perkembangan sosial di negaranya sehingga Bhutan menjadi negara pertama yang mengadopsi konsep kebahagiaan dalam pengukuran kesejahteraan. Konsep GNH sendiri terdiri dari empat faktor utama yaitu pembangunan sosial-ekonomi yang adil, budaya, pelestarian lingkungan, dan tata pemerintahan yang baik (Komisi GNH dalam Chen, 2015). Indikator *Gross National Happiness* meliputi 9 domain, yaitu kesehatan psikologis, kesehatan, pendidikan, penggunaan waktu, keanekaragaman dan ketahanan budaya, pemerintahan yang baik, vitalitas masyarakat, keanekaragaman dan ketahanan ekologis, dan standar hidup (Putra dan Sudibia, 2013).

Kebahagiaan merupakan tujuan akhir hidup bagi seseorang di seluruh dunia dan pada kenyataannya memang setiap manusia menginginkan rasa bahagia dalam hidupnya (Frey dalam Putra dan Sudibia, 2013). Perasaan bahagia itu pula yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan sehari-hari seseorang, bahkan bagi lingkungan sekitarnya karena kebahagiaan dapat memengaruhi segala

aspek kehidupan manusia. Dalam perspektif Islam, kesejahteraan atau kebahagiaan dapat tercapai apabila manusia melakukan seluruh kegiatannya sesuai dengan landasan hukum islam atau sesuai syariah. Kondisi masyarakat yang mengalami kesenjangan ekonomi atau kesenjangan rezeki menyebabkan adanya faktor religius yang akan menciptakan mekanisme ekonomi dengan sendirinya, dimana orang yang memiliki kelebihan harta akan menyumbangkan sebagian hartanya kepada orang yang lebih membutuhkan sehingga hal itu dapat mengurangi kesenjangan ekonomi tapi belum bisa menghilangkannya (Purwana, 2014). Adapun ayat Al Qur'an yang menjelaskan tentang kesejahteraan terdapat dalam QS. An-Nisa: 9 sebagai berikut:

وَأَيُّخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraannya). Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diraih dengan ketaqwaan kepada Allah SWT dan juga berbicara yang baik. Dalam ayat tersebut juga disebutkan bahwa manusia harus memikirkan kesejahteraan generasi selanjutnya, oleh karena itu harus dipersiapkan generasi penerus yang memiliki ketaqwaan juga kepada Allah SWT sehingga dapat diberikan kesejahteraan terus menerus. Hal yang berkaitan dengan kesejahteraan juga terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dimana salah satu tujuan negara Indonesia pada alinea ke-

empat yang berbunyi “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...”. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang merupakan tugas dan tanggung jawab negara dalam pencapaian kesejahteraan masyarakatnya, namun tidak hanya negara yang bertanggung jawab sepenuhnya tetapi juga tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan laporan *World Happiness Report* peringkat Indonesia dilihat dari indeks kebahagiaan diantara negara ASEAN lainnya terdapat pada Tabel 1.1.

Tabel 1. 1.
Rangking negara di ASEAN dalam *World Happiness Report*

Negara ASEAN	Tahun 2018	Tahun 2019
Singapura	34	34
Thailand	46	52
Malaysia	35	80
Philipina	71	69
Indonesia	96	92
Vietnam	95	94

Sumber: *World Happiness Report 2019*

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, pada regional ASEAN dapat dilihat bahwa Singapura merupakan negara yang berada pada peringkat teratas kemudian diikuti oleh negara Thailand, Malaysia, Philipina, Indonesia, dan Vietnam. Diantara negara-negara ASEAN tersebut, beberapa negara mengalami peningkatan peringkat anatara lain negara Philipina, Indonesia, dan Vietnam, akan tetapi negara Thailand dan Malaysia mengalami penurunan peringkat sedangkan negara Singapura tidak mengalami peningkatan maupun penurunan peringkat. Adapun peringkat Indonesia

dari keseluruhan negara-negara di dunia pada tahun 2018 yaitu peringkat ke-96 dari 156 negara, sedangkan pada tahun 2019 Indonesia menempati peringkat ke-92 dari 156 negara. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan indeks kebahagiaan berdasarkan pada beberapa penilaian antara lain *Gross Domestic Products* per kapita, harapan hidup sehat, *generosity*, kebebasan dalam membuat pilihan hidup, dukungan sosial, dan persepsi korupsi.

Sementara itu, di Indonesia sendiri sejak tahun 2012 lalu sudah mulai melakukan pengukuran indeks kebahagiaan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui metode survei. Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan publikasi berupa gambaran umum tentang bagaimana kondisi kehidupan masyarakat di Indonesia yang didalamnya terdiri dari dimensi perasaan, dimensi kepuasan hidup, dan dimensi makna hidup. Hasil publikasi yang dilakukan oleh BPS menunjukkan bahwa terjadi peningkatan indeks kebahagiaan dari tahun 2014 yang hanya sebesar 68,28 menjadi 70,69 pada tahun 2019 dari skala 0 sampai 100. Indeks kebahagiaan tersebut tersusun atas tingkat kepuasan terhadap 10 aspek yang terdiri dari kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisi rumah dan aset, keadaan lingkungan dan kondisi keamanan. Adapun indeks indikator penyusun indeks kebahagiaan dapat dilihat pada Tabel 1.2, dimana dalam Tabel 1.2 menunjukkan kesepuluh indikator penyusun indeks kebahagiaan dengan keterangan dalam skala 0-100, skala

0-25 menunjukkan tidak bahagia, skala 25-50 menunjukkan kurang bahagia, skala 50-75 menunjukkan bahagia, dan skala 75-100 menunjukkan sangat bahagia.

Tabel 1. 2.
Indikator Penyusun Indeks Kebahagiaan Indonesia

Indikator Penyusun	Tahun 2014	Tahun 2017
Pendapatan Rumah Tangga	63,09	62,99
Kondisi Rumah dan Aset	65,01	69,28
Pekerjaan	67,08	67,15
Pendidikan	58,28	59,90
Kesehatan	69,72	71,12
Ketersediaan Waktu Luang	71,74	72,08
Hubungan Sosial	74,29	75,45
Keharmonisan Keluarga	78,89	80,05
Kondisi Keamanan	76,63	77,15
Keadaan Lingkungan	74,86	76,09

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa rata-rata dari kesepuluh indikator penyusun indeks kebahagiaan menunjukkan secara umum masyarakat Indonesia pada tahun 2014 maupun tahun 2017 sudah merasa bahagia. Hal ini menunjukkan faktor yang mempengaruhi kebahagiaan di Indonesia tidak hanya pendapatan saja, tetapi faktor sosial juga ikut mempengaruhi.

Studi yang menyatakan kebahagiaan tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan pertama kali dilakukan oleh Easterlin pada tahun 1974, Easterlin menyatakan bahwa adanya kenaikan pendapatan seseorang tidak mampu meningkatkan kesejahteraannya juga. Keadaan itulah yang menunjukkan adanya *paradox of happiness* atau *income paradox*, atau lebih dikenal dengan sebutan *Easterlin Paradox*. Hasil penelitian yang sama juga didapatkan oleh Clark, Frijters, dan Shields (2008) yang

menyatakan bahwa adanya *Easterlin paradox* dapat menunjukkan adanya faktor lain yang mempengaruhi kebahagiaan selain faktor pendapatan. Menurut Helliwell dalam Rahayu (2016) faktor non material yang berperan penting dalam kebahagiaan ialah yang menyangkut dimensi sosial dari *human well-being*. Bartolini dan Bilancini (2010) juga berpendapat bahwa faktor kualitas dan kuantitas relasi sosial merupakan faktor yang penting untuk meningkatkan *subjective well-being*. Hasil penelitian yang sama juga menyebutkan bahwa kohesi sosial adalah faktor penting dalam kepuasan hidup seseorang (Berger-Schmitt, 2002).

Studi tentang kebahagiaan di Indonesia sendiri masih perlu dilakukan, beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan secara absolut. Sohn (2010) dan Landiyanto *et al.* (2011), dalam penelitian yang dilakukan hal yang paling ditekankan ialah pentingnya faktor pendapatan (material) dan juga faktor non-material terhadap kebahagiaan atau kesejahteraan di Indonesia. Faktor pendapatan (material) memiliki peran penting bagi kesejahteraan pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, apabila masyarakat suatu negara sudah dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka dan mengalami peningkatan kekayaan (*wealth*), maka adanya perbedaan kebahagiaan antar individu atau kesejahteraan hidup sangat dipengaruhi oleh faktor non-material seperti relasi sosial (Diener dan Seligman, 2004; Kesebir dan Diener, 2008). Ini sejalan dengan teori hirarki kebutuhan Maslow bahwa yang terendah adalah

kebutuhan dasar dan ketika pendapatan makin tinggi maka individu akan mencoba memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi yaitu kebutuhan sosial, *esteem*, dan aktualiasasi diri (Sirgy, 1986). Kebahagiaan tetap tidak dapat terlepas dari kekayaan (*wealth*), dengan pendapatan yang semakin tinggi seseorang akan merasa lebih bahagia dibandingkan dengan seseorang yang memiliki pendapatan rendah. Kapteyn, Smith dan Soest (2010) menyatakan bahwa indikator kebahagiaan adalah tingkat kesejahteraan karena kebahagiaan merupakan cerminan dari kesejahteraan yang diraih oleh masing-masing individu. Masalah yang sering dihadapi oleh suatu negara terkait dengan kemakmuran rakyat termasuk kemiskinan, pengangguran, kesehatan, dan pendidikan. Faktor-faktor tersebut yang dapat mempengaruhi kebahagiaan. Smith *et al.* (2005) menyatakan bahwa kekayaan (*wealth*) menjadi penyangga bagi *well-being* setelah penurunan kesehatan. Hal ini sejalan dengan penelitian Rahayu dan Harmadi (2016), terdapat faktor status pernikahan, kesehatan, dan keharmonisan keluarga yang memiliki pengaruh yang paling besar terhadap kebahagiaan di Indonesia. Namun, faktor lain seperti pendapatan absolut, tinggi rendahnya pendidikan, partisipasi dalam masyarakat, toleransi terhadap orang lain juga memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kebahagiaan. Tiliouine *et al.* dalam Mayasari (2014) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif kuat terhadap *subjective well-being*. Segala persoalan hidup yang diarahkan kepada Tuhan akan menyebabkan individu merasakan ketenangan dalam hidup, semakin tinggi tingkat

religiusitas maka seseorang semakin mampu memaknai kejadian hidupnya secara positif sehingga hidupnya menjadi lebih bermakna dan merasa bahagia. Religiusitas Islam menunjukkan bahwa Islam mengisi individu dengan harapan akan masa depan dan menciptakan makna dalam hidup (Mayasari, 2014).

Indonesia sebagai negara berkembang dan dengan mayoritas penduduknya beragama islam memiliki tujuan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat seperti yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 alinea ke-empat, "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...". Ini membuktikan bahwa negara Indonesia sangat serius dalam upaya untuk mewujudkan dan terus meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia sesuai dengan tujuan tersebut. Namun, dalam perkembangannya Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, hal ini tentu sangat menarik untuk diteliti mengenai faktor apa saja yang sangat berpengaruh terhadap indeks kebahagiaan sehingga hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menciptakan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS KEBAHAGIAAN DI INDONESIA"**. Studi ini meneliti bagaimana pengaruh status pernikahan, status kesehatan,

tingkat pendidikan, status pekerjaan, dan ketaatan beragama terhadap indeks kebahagiaan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil ialah:

1. Bagaimana pengaruh variabel status pernikahan terhadap indeks kebahagiaan di Indonesia tahun 2014?
2. Bagaimana pengaruh variabel status kesehatan terhadap indeks kebahagiaan di Indonesia tahun 2014?
3. Bagaimana pengaruh variabel tingkat pendidikan terhadap indeks kebahagiaan di Indonesia tahun 2014?
4. Bagaimana pengaruh variabel status pekerjaan terhadap indeks kebahagiaan di Indonesia tahun 2014?
5. Bagaimana pengaruh variabel ketaatan beragama terhadap indeks kebahagiaan di Indonesia tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang dilakukan ialah:

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel status pernikahan terhadap indeks kebahagiaan di Indonesia tahun 2014.
2. Untuk mengetahui pengaruh variabel kesehatan terhadap indeks kebahagiaan di Indonesia tahun 2014.

3. Untuk mengetahui pengaruh variabel pendidikan terhadap indeks kebahagiaan di Indonesia tahun 2014.
4. Untuk mengetahui pengaruh variabel status pekerjaan terhadap indeks kebahagiaan di Indonesia tahun 2014.
5. Untuk mengetahui pengaruh variabel ketaatan beragama terhadap indeks kebahagiaan di Indonesia tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dapat digunakan sebagai bahan referensi penelitian yang memiliki keterkaitan dengan indeks kebahagiaan.

2. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan referensi bagi pemerintah di Indonesia dalam hal pembuat kebijakan yang memasukan faktor kebahagiaan untuk kedepannya serta pemerintah dapat merancang dan melaksanakan program kerja yang dapat meningkatkan kebahagiaan masyarakat Indonesia.

3. Bagi Peneliti atau Akademisi

Dapat dijadikan bahan pengembangan studi atau penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi indeks kebahagiaan di Indonesia.